

ANALISIS PERKUATAN ALUTSISTA KOARMADA III DALAM RANGKA ANTISIPASI KERAWANAN KEAMANAN DI SEKITAR ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA III

Sunarto Eko Wahyudi

Kasubdep Lapansah Depjuang, Seskoal

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.183>

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesiapan Koarmada III dalam mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III. ALKI III merupakan jalur pelayaran internasional yang strategis namun rentan terhadap berbagai ancaman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa saat ini jumlah unsur KRI yang dimiliki Koarmada III saat ini tidak mencukupi untuk melakukan patroli keamanan secara optimal di seluruh wilayah ALKI III. Hal ini menjadi sebuah tantangan mengingat kondisi geografis ALKI III yang kompleks dengan banyak pulau dan selat menyulitkan operasi patroli. Selain itu ditemukan juga kondisi dimana beberapa unsur KRI yang ada di jajaran Koarmada III belum dilengkapi dengan teknologi yang memadai, seperti sistem komunikasi satelit. Atas kondisi ini, Koarmada III masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengamankan ALKI III. Untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut, diperlukan upaya peningkatan jumlah dan kualitas alutsista, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan teknologi. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan anggaran untuk pengadaan alutsista, pengembangan sistem komunikasi yang lebih baik, dan peningkatan kerja sama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Koarmada III, ALKI III, keamanan maritim, alutsista, patroli keamanan laut.

Abstract

This study analyzes the readiness of Koarmada III in securing the Indonesian Archipelago Sea Lane (ALKI) III. ALKI III is a strategic international shipping lane but is vulnerable to various threats. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through literature studies and analysis of related documents. The results of the analysis show that currently the number of KRI elements owned by Koarmada III is currently insufficient to carry out optimal security patrols throughout the ALKI III region. This is a challenge considering the complex geographical conditions of ALKI III with many islands and straits that make patrol operations difficult. In addition, it was also found that several KRI elements in the ranks of Koarmada III were not equipped with adequate technology, such as satellite communication systems. Due to this condition, Koarmada III still faces a number of challenges in securing ALKI III. To improve security in the region, efforts are needed to increase the number and quality of defense equipment, develop

human resources, and optimize the use of technology. The recommendations submitted include increasing the budget for the procurement of defense equipment, developing a better communication system, and increasing cooperation with related agencies.

Keywords: Koarmada III, ALKI III, maritime security, defense equipment, maritime security patrol.

PENDAHULUAN



Gambar 1. Kedudukan ALKI di Tengah Gugus Kepulauan Indonesia
Sumber : The Global Review (2014)

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan alur laut yang terbuka untuk jalur pelayaran Internasional diantara gugus kepulauan Indonesia.¹ ALKI sendiri di tetapkan atas dasar konvensi hukum laut internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982,² dan dinyatakan sebagai hukum positif internasional sejak 16 November 1994 telah mengakui hak Indonesia sebagai *Archipelagic State* serta diratifikasi oleh Pemerintah dengan

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.³ Sesuai dengan maksud penetapannya, seluruh kapal dari negara mana pun dapat melintasi gugus kepulauan Indonesia secara lintas damai dengan memanfaatkan keberadaan ALKI. Atas luas bentangan gugus kepulauan yang membentuk Indonesia, Pemerintah selanjutnya menetapkan 3 buah alur laut yang dikenal dengan nama ALKI I, ALKI II dan ALKI III. Ketiganya membentang dari arah utara menuju selatan (Gambar 1).

¹ Atillah, R., Gischa, S., (2023). Mengenal Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/20/030000169/mengenal-jalur-alur-laut-kepulauan-indonesia-?page=all>. Diakses 13 November 2024 Pukul 19.00 WIB

² Pasal 46-53 UNCLOS 1982

³ Rustam, I., (2015). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Jurnal Indonesia Prespective, Vol. 1, No. 1, H. 1 - 22

ALKI III. Terletak paling timur membentang mulai dari sebelah selatan gugus kepulauan yang membentuk negara Filipina (2 pintu) melintasi kepulauan Maluku dan terpecah menjadi 4 alur di Laut Banda menuju gugus kepulauan Nusantara di sekitar negara Timor Leste, Nusa Tenggara Timur hingga laut Arafuru. Membentuk alur sepanjang +/- 860 NM (Nautika Mile) dengan luas mencapai 43.000 NM². (Dari 11° 00' 00" S– 122° 10' 00" T hingga 03° 25' 00" U – 127° 40' 00" T)⁴. Situasi ini menimbulkan kerawanan keamanan atasnya.

Komando Armada (Koarmada III). Adalah salah satu Komando Utama Operasi di lingkungan TNI AL yang berkedudukan di di Jl. Yos Sudarso Katapop, Distrik Salawati, Kab. Sorong, Papua Barat Daya. Koarmada III memiliki tugas pokok; Menyelenggarakan operasi intelijen maritim guna mendukung pelaksanaan operasi laut; Menyelenggarakan operasi tempur laut dalam rangka OMP (Operasi Militer Perang) baik operasi gabungan maupun mandiri, dan; Menyelenggarakan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) baik berupa operasi laut sehari-hari maupun operasi keamanan laut di wilayahnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.

⁴ Zamara, R., (2024). Optimalisasi Operasi Keamanan Laut Guskamla Koarmada III Guna Meningkatkan Keamanan Laut di Wilayah ALKI III dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Negara di Laut. Taskap SMS-19. Jakarta : Seskoal (Tidak diterbitkan)

ALKI III masuk kedalam area kerja Koarmada III dan atasnya melekat tugas mencegah kerawanan padanya (ALKI III). Untuk memastikan terselenggara tugas ini, Koarmada III wajib memiliki cukup kekuatan untuk melaksanakan patroli keamanan laut di sekitar ALKI III.

Dalam rangka mengupas lebih mendalam tentang perkuatan alutsista Koarmada III dalam rangka antisipasi kerawanan keamanan di sekitar ALKI III, penelitian ini dilaksanakann

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana dalam penelusuran terhadap kesenjangan yang ada dilakukan pendalaman atasnya secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. dalam konteks yang spesifik.⁵ Dari perjalanan penelitian diharapkan ditemukan sebuah kesimpulan atas permasalahan yang ada untuk dilakukan upaya tertentu mengatasi atau mengantisipasi apabila di kemudian hari kasus serupa muncul.

⁵ Rahardjo, M., (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya. Makalah. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Tidak Diterbitkan)

PEMBAHASAN

Penetapan tentang ALKI secara perundangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara kepulauan Indonesia dan Alur Laut Kepulauan. Hal ini wajib ditetapkan sebagai imbas penetapan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan (menurut UNCLOS tahun 1982). Secara umum ketentuan tentangnya berdasarkan Undang-Undang dimaksud adalah Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya. Atas dasar hal ini, Pemerintah menetapkan 3 ALKI yang salah satunya adalah ALKI III yang terletak disisi timur gugus kepulauan Indonesia.

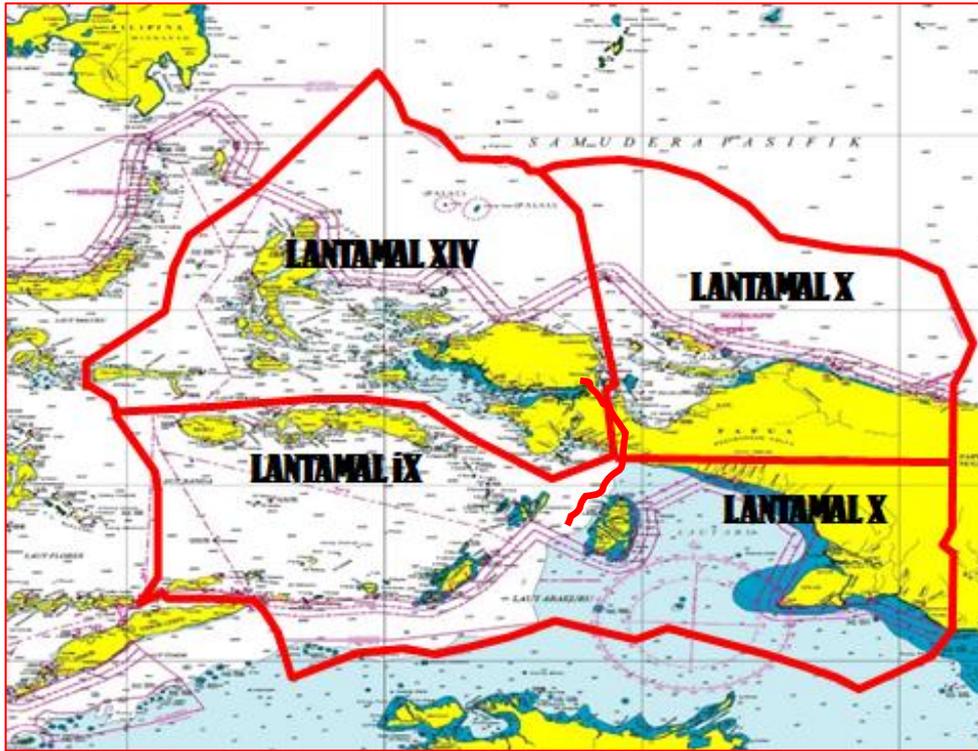
ALKI III. membentang mulai dari sebelah selatan gugus kepulauan yang membentuk negara Filipina (2 pintu) melintasi kepulauan Maluku dan terpecah menjadi 4 alur di Laut Banda menuju gugus kepulauan Nusantara di sekitar negara Timor Leste, Nusa Tenggara Timur hingga laut Arafuru. Membentuk alur sepanjang +/-

860 NM (Nautika Mile) dengan luas mencapai 43.000 NM². (Dari 11° 00' 00" S– 122° 10' 00" T hingga 03° 25' 00" U – 127° 40' 00" T)⁶. Situasi ini menimbulkan kerawanan keamanan atasnya. Terhadap hal ini Koarmada III yang menjadi Komando Utama di wilayah timur Indonesia menjadi yang terdepan (sebagai lembaga negara) untuk melakukan pencegahan kerawanan di ALKI III.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Koarmada III melingkupi 4 buah Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), masing-masing; Lantamal IX, Lantamal XI dan Lantamal XIV (Gambar 2). Terhadap upaya mencegah kerawanan keamanan di ALKI III, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dimana pasal 9 ayat 2 menyampaikan bahwa salah satu tugas TNI AL adalah⁷ **"Menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut di wilayah yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan Internasional yang telah diratifikasi"**. Implikasinya adalah jika keamanan di wilayah ALKI III aman dari segala ancaman dengan melaksanakan penegakan hukum di laut telah meningkat maka penegakan kedaulatan negara dilaut sebagai tugas TNI AL dapat terlaksana sesuai dengan Undang undang no 34 tahun 2004 pasal 9 ayat 2.

⁶ Zamara, R., (2024)

⁷ Undang Undang RI No 34 Tahun 2004 pasal 9 ayat 2



Gambar 2. Wilayah Kerja Koarmada III
Sumber : Zamara, R. (2024)

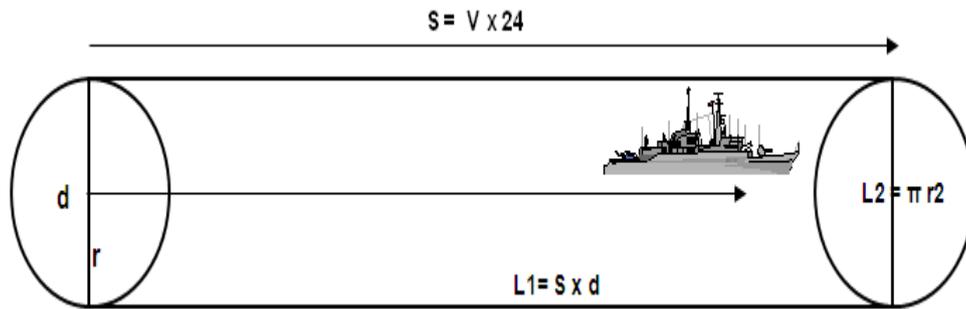
Terhadap upaya keamanan perairan (termasuk didalamnya keamanan di ALKI III, Koarmada III memiliki perangkat berupa Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada III. Guskamla Koarmada III memiliki tugas spesifik berupa pengamanan laut dan pertahanan laut, dan beroperasi sebagai satuan tugas yang tangguh dan efektif dalam menghadapi ancaman di laut.⁸ Dalam pelaksanaan tugas ini Guskamla Koarmada III menggunakan unsur KRI yang ada di jajaran Markas Komando (Mako) Koarmada II dan unsur-unsur KRI

yang bernaung di bawah jajaran Lantamal yang ada di lingkungan Koarmada III.

Secara hitungan matematika, untuk melakukan covered masalah keamanan di ALKI III dibutuhkan perhitungan tertentu dengan menggunakan rumus waktu sasaran melewati lebar tertentu yang mampu dilindungi oleh KRI lebih kecil atau minimal sama dengan waktu yang digunakan oleh KRI selama berlayar sepanjang $t_{k.as} = 2 L$ (L = Panjang daerah Patroli). Kapal yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain selama *endurance*-nya.⁹ Untuk perhitungan luas jangkauan *covered* kapal digambarkan dan dirumuskan pada gambar 3

⁸ Koarmada III., (2019). Doktrin Operasi Laut Koarmada III: Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Laut. Jakarta : Koarmada III

⁹ Okol, 2008 Model Optimasi Penempatan Armada, ITS, Surabaya



Gambar 3. Luas jangkauan Covered KRI

Keterangan :

S = Jarak jelajah per *endurance* (mil)

E = *Endurance* (jam)

V = Kecepatan kapal (mil/jam)

$L1$ = Luas Persegi panjang (mil^2)

$L2$ = Luas Lingkaran (m^2)

D = Jangkauan Radar (mil^2)

r = Jari jari Lingkaran jangkauan radar (mil)

Lingkaran jangkauan covered KRI adalah Luasan persegi panjang ($L1$) ditambah dengan luasan lingkaran ($L2$)

Luasan *Covered Area* = $(L1 + L2) \times$
Probabilitas deteksi radar

Luasan *Covered Area* = $(L1 + L2) \times$
 $0,9$ (mil^2)

Jarak Jelajah kapal patrol = jarak
jelajah perhari x *Endurance*

$$S = E \times V \text{ (mil)}$$

Berdasarkan rumus diatas terhadap luas area ALKI III dapat ditetapkan jumlah minimal unsur KRI yang harus melakukan patroli keamanan sebagai berikut;

a) Luas ALKI III adalah $860 \text{ NM} \times 50 \text{ NM} = 43.000 \text{ NM}^2$.

b) Jumlah KRI yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus berdasarkan waktu

asaran melewati jarak lebar yang mampu diawasi oleh KRI harus lebih kecil atau minimal sama dengan waktu yang digunakan oleh KRI selama berlayar sepanjang tikas = $2L$ (L = panjang daerah patroli).

(1) Jika diasumsikan bahwa :

(a) Deteksi radar ($R \text{ det}$) = 24 NM^2

(b) Kec. Sendiri (Vs) = 15 knots .

(c) Kec. Musuh (Vm) = 12 knots .

(2) Rumus perhitungan yang digunakan :

(a) $Lp = (Vs/Vm \times R \text{ det}) + Wp$

(b) $Wp = 2 \times R \text{ det}$

(c) $Ap = Lp \times Wp$

(3) Maka perhitungannya :

(a) $Lp = (15/12 \times 24) + (2 \times 24) = 78 \text{ NM}$

(b) $Wp = 2 \times 24 = 48 \text{ NM}^2$

(c) $Ap = 78 \times 48 = 3.744 \text{ NM}^2$

c) Luas wilayah ALKI III yang harus diawasi adalah 43.000 NM^2 . Jumlah KRI yang ideal untuk beroperasi secara terus

menerus di wilayah perairan ALKI III adalah $43.000 \text{ NM}^2 / 3.744 \text{ NM}^2 = 11,48 = 12$ KRI yang beroperasi khusus untuk melindungi wilayah perairan di sepanjang ALKI III dan sekitarnya.

d) Kebijakan operasional KRI di lingkungan TNI AL adalah 1/3 kekuatan unsur KRI melaksanakan operasi, 1/3 siap di pangkalan, dan 1/3 melaksanakan pemantapan konis. Atas hal ini, maka jumlah ideal unsur KRI yang diperlukan untuk melaksanakan operasi keamanan laut di wilayah ALKI III adalah 36 KRI.

Menjadi pertanyaan peneliti, berapakah jumlah unsur KRI yang bernaung di jajaran Koarmada III saat ini?

Saat ini jumlah unsur KRI yang dalam kondisi aktif di jajaran Koarmada III adalah 19 unsur KRI. Terdiri dari KRI kelas *Corvette*, seperti KRI Fatahillah-361 dan KRI Malahayati-362, adalah kapal perang utama dengan kemampuan tempur yang handal dan jarak jangkauan yang luas. Sementara itu, KRI kelas Kapal Cepat Rudal (KCR), seperti KRI Kapak-625 dan KRI Panah-626, adalah kapal cepat rudal yang memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan dapat beroperasi di perairan dangkal. Selain itu, KRI kelas *landing ship tank* (LST), KRI Teluk lada-521, KRI Teluk Wondama-526 dan KRI Teluk Wondama-527, dan KRI kelas Patrol Craft (PC) yang merupakan kapal patroli yang di gelar dibawah satuan kapal patroli Lantamal

dibawah jajaran Koarmada III yang diantaranya KRI Sura-802, KRI Kerapu-812, KRI Tatihu-853, KRI Layaran-854, KRI Madidihang-855, KRI Albakora-867, KRI Gulamah-869, KRI Posep-870, KRI Matabongsang-873, KRI Dorang-874, dan KRI Bawal-875.

Berdasar pada hitungan matematika dapat diketahui bahwa Koarmada III memiliki kekurangan jumlah unsur KRI untuk melakukan patroli keamanan di sepanjang area ALKI III dan sekitarnya. Hal ini belum menghitung kondisi Konis masing-masing kapal yang apabila dilakukan, besar kemungkinan beberapa unsur KRI di atas dalam kondisi tidak laik operasi. Tidak kalah pentingnya dari permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman sebagai pengawak unsur KRI yang melaksanakan tugas operasi yang di gelar oleh Guskamla Koarmada III.¹⁰

Situasi lain yang menjadi perhatian adalah situasi di ALKI III dimana ALKI III memiliki ke-khas-an sendiri terkait masalah geografis yang unik, seperti selat-selat dan perairan yang sempit, membuat Koarmada III harus memiliki kemampuan

¹⁰ TNI AL. (2020). Doktrin Pengamanan Laut TNI AL: Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Laut. Jakarta: TNI AL.

dan kinerja yang tinggi.¹¹ Selain itu di tengah ALKI III terdapat Laut Banda yang terkenal dengan cuaca yang ekstrem yang dapat mempengaruhi gelar operasi yang dilaksanakan Koarmada III dalam upaya menjamin keamanan di ALKI III.¹² Dan hal terakhir yang menjadi perhatian peneliti adalah Faktor teknologi dimana terhadap teknologi komunikasi sekalipun, banyak unsur KRI di lingkungan Koarmada III (terutama kelas PC) belum dilengkapi teknologi telepon satelit untuk memperkuat komunikasi dengan *home base*.

Atas situasi ini, secara keseluruhan peneliti dapat mengambil kesimpulan awal bahwa Koarmada III masih belum cukup kuat untuk mengeliminir setiap kerawanan keamanan yang terjadi di ALKI III. Untuk itu diperlukan upaya strategis yang oleh peneliti diusulkan sebagai berikut:

- 1) Mencapai kondisi teknis KRI yang prima dan tercapai jumlah ideal untuk pelaksanaan operasi keamanan laut di perairan ALKI III. Meski secara teori dapat dilakukan dengan mudah, namun dalam mewujudkannya membutuhkan upaya yang cukup panjang dan kompleks. Faktor penyebab adalah keberadaan TNI AL yang dalam setiap laju gerak operasionalnya sangat tergantung pada

kebijakan negara, utama di bidang mata anggaran. strategi yang dapat dikembangkan Koarmada III adalah tetap mengupayakan usaha penambahan mata anggaran dan unsur KRI kepada komando atas secara berjenjang. Saat bersamaan, memberi terus melakukan upaya optimalisasi dengan meningkatkan jumlah kehadiran unsur KRI di laut secara lebih maksimal, terutama pada perairan ALKI III.

- 2) Meningkatkan respon dalam menghadapi ancaman keamanan di laut. Hal ini sangat penting dihadapkan dengan tugas pokok Guskamla Koarmada III. Terhadap permasalahan lambatnya respon dalam menghadapi ancaman keamanan di laut, langkah utama adalah mengajukan usulan pemenuhan telepon satelit untuk jajaran unsur patroli yang bernaung dibawah Satuan Patroli Lantamal yang ada di bawah Koarmada III.

- 3) Mengoptimalkan potensi unsur KRI yang dimiliki selama upaya 1) dan 2) belum tercapai. Bentuk optimalisasi antaranya menempatkan unsur KRI di pangkalan TNI AL yang berkedudukan di tepi atau sekitar ALKI III. Hal ini akan meningkatkan kemampuan respon unsur KRI terhadap kerawanan keamanan yang terjadi di ALKI III.

KESIMPULAN

¹¹ Prasetyo, E., (2018). Dampak Geografi terhadap Keamanan Maritim di Wilayah ALKI III. Jurnal Studi Maritim

¹² Ramli, R., (2019). Efek Kondisi Cuaca terhadap Operasi Keamanan Maritim. Jurnal Urusan Maritim Internasional

Koarmada III menghadapi tantangan signifikan dalam mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III. Meskipun telah dilengkapi dengan Gugus Keamanan Laut (Guskamla), kekurangan jumlah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang beroperasi, keterbatasan teknologi, dan kondisi geografis yang unik di wilayah tersebut menjadi kendala utama. Perhitungan matematis menunjukkan bahwa jumlah KRI yang dimiliki Koarmada III saat ini jauh di bawah jumlah ideal yang dibutuhkan untuk melakukan patroli keamanan secara efektif di seluruh wilayah ALKI III. Selain itu, kondisi teknis KRI yang tidak selalu prima dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat. Secara keseluruhan, Koarmada III membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam mengamankan ALKI III. Dengan upaya yang terpadu dan komprehensif, diharapkan keamanan dan keselamatan di wilayah tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atillah, R., Gischa, S., (2023). Mengenal Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia Kompas.com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/20/030000169/mengenal-jalur-alur-laut-kepulauan-indonesia-?page=all>. Diakses 13 November 2024 Pukul 19.00 WIB
- Koarmada III., (2019). Doktrin Operasi Laut Koarmada III: Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Laut. Jakarta : Koarmada III
- Okol, (2008) Model Optimasi Penempatan Armada. Surabaya : Institut Teknologi Surabaya
- Prasetyo, E., (2018). Dampak Geografi terhadap Keamanan Maritim di Wilayah ALKI III. Jurnal Studi Maritim
- Ramli, R., (2019). Efek Kondisi Cuaca terhadap Operasi Keamanan Maritim. Jurnal Urusan Maritim Internasional
- Rahardjo, M., (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya. Makalah. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Tidak Diterbitkan)
- Rustam, I., (2015). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Jurnal Indonesia Prespective, Vol. 1, No. 1, H. 1 - 22
- Zamara, R., (2024). Optimalisasi Operasi Keamanan Laut Guskamla Koarmada III Guna Meningkatkan Keamanan Laut di Wilayah ALKI III dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Negara di Laut. Taskap SMS-19. Jakarta : Seskoal (Tidak diterbitkan)